

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Literatur Hukum

Agustina, Rosa. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.

Djojodirdjo, M.A. Moegni. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1982.

Fuady, Munir. *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.

Gunawan. *Klausula Baku dan Perlindungan Konsumen di Sektor Perbankan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

Harahap, M. Yahya. *Aspek-Aspek Hukum Perjanjian Kredit dan Surat-Surat Berharga*. Cetakan ke-2. Bandung: Sinar Grafika, 2020.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Perjanjian dan Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

Khoidin, Muhammad. *Hukum Eksekusi Bidang Perdata*. Yogyakarta: LaksBang Justitia, 2018.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2022.

Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2009.

Prodjodikoro, R. Wirjono. *Perbuatan Melanggar Hukum: Dipandang dari Sudut Hukum Perdata*. Bandung: Sumur, 1976.

Satrio, Johannes. *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Edisi Revisi. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2021.

Satrio, J. *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.

Setiawan, R. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Binacipta, 1987.

Sihombing, A. *Eksekusi Fidusia dan Perlindungan Konsumen: Studi tentang Korelasi Klausula Sepihak dengan Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: Refika Aditama, 2023.

Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2001.

Tresna, R. *Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni, 1980.

Usman, Rachmadi. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Wibowo, R. **Eksekusi Fidusia dalam Putusan Pengadilan: Analisis Yurisprudensi 2019-2022**. Jakarta: Kencana, 2022.

Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. *Jaminan Fidusia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.

B. Jurnal, Artikel, dan Sumber Lain

Hikmah. "Efektivitas UUPK dalam Melindungi Konsumen Pembiayaan." Disertasi, Universitas Indonesia, 2021.

Mahmud, Jon. "Dari Wanprestasi ke Pidana: Titik Singgung Eksekusi Jaminan Fidusia." *Dandapala Digital*, 9 November 2025.

<https://dandapala.com/opini/detail/dari-wanprestasi-ke-pidana-titik-singgung-eksekusi-jaminan-fidusia>.

Nurjaman, A., dan B. Siregar. "Analisis Klausula Eksonerasi dan Kewenangan Eksekusi Sepihak dalam Perjanjian Pembiayaan di Indonesia." *Jurnal Hukum Bisnis* 40, no. 2 (2022): 45-67.

Otoritas Jasa Keuangan. *Laporan Tahunan Otoritas Jasa Keuangan 2023*. Jakarta: OJK, 2024.

Otoritas Jasa Keuangan. *Statistik Industri Pembiayaan Semester I 2024*. Jakarta: OJK, 2024.

Otoritas Jasa Keuangan. *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2023*. Jakarta: OJK, 2023.

Pusat Studi Hukum Konsumen Universitas Indonesia. *Laporan Penelitian: Klausula Merugikan dalam Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor di Indonesia*. Depok: Pusat Studi Hukum Konsumen UI, 2023.

Sihombing, A. "Korelasi Klausula Eksekusi Sepihak dengan Peningkatan Tuntutan PMH dalam Perjanjian Pembiayaan." *Jurnal Hukum Bisnis* 42, no. 1 (2023): 89-90.

Spier, J., et al. *Verbintenissen uit de Wet en Schadevergoeding*. Deventer: Kluwer, 2009.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253.

Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 102.

Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 79.

Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Tata Cara Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 638.

Otoritas Jasa Keuangan. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 197.

Otoritas Jasa Keuangan. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2023 tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 12.

D. Putusan Pengadilan

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 1363 K/Sip/1972. *Kasus Banjir Bandang Lembaga Tilan Semarang*.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 3102 K/Pdt/1983.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 3132 K/Pdt/1984.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 4025 K/Pdt/2008.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 3557 K/Pdt/2015.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019. *Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 2/PUU-XVIII/2020.

Pengadilan Negeri Malang. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2025/PN Malang.

E. Dokumen Perkara dan Perjanjian

Akta Jaminan Fidusia Nomor 582 tanggal 23 Juni 2023, yang dibuat di hadapan Notaris Erlie Wulandari, S.H., di Kota Tangerang Selatan.

Perjanjian Pembiayaan Nomor 12123281100084 tanggal 14 Juni 2023 antara Ali Wefa dan PT. MNC Finance.

Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W15.00467578.AH.05.01 Tahun 2023 tanggal 23 Juni 2023 yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah Jawa Timur Kementerian Hukum dan HAM.

Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia tanggal 14 Juni 2023.